

"DIGITALISASI TANPA GOVERNANSI AKAN MEMPERLUAS KETIMPANGAN"

Strategi Nasional Menghadapi Paradoks Gig Economy dan Kesenjangan Digital

Transformasi digital membuka peluang besar, namun tanpa governansi yang kuat, ia dapat memperdalam ketimpangan dan kerentanan pekerja.



Disusun oleh:
Prof. Septiana Dwiputrianti, SE, M. Com (Hons), Ph.D.

Guru Besar Kebijakan dan Governansi Publik Politeknik STIA LAN Bandung

Septiana Dwiputrianti

PARADOKS DIGITAL INDONESIA

- Pengguna Internet meringkat pesat
- Gig economy bertumbuh cepat
- Ketimpangan & kerentanan pekerja digital masih tinggi

Tanpa governansi yang tepat, kemajuan digital tidak otomatis membawa keadilan.

RINGKASAN EKSEKUTIF

AKAR MASALAH

- Lemahnya regulasi platform digital
- Dominasi sektor informal digital
- Rendahnya perlindungan pekerja gig
- Kesenjangan akses & literasi digital
- Regulasi tertinggal dari inovasi teknologi

MENGAPA STRATEGIS?

- Menentukan masa depan tenaga kerja
- Meningkatkan produktivitas ekonomi
- Menjaga stabilitas sosial & inklusif digital
- Meningkatkan daya saing nasional

SOLUSI UTAMA

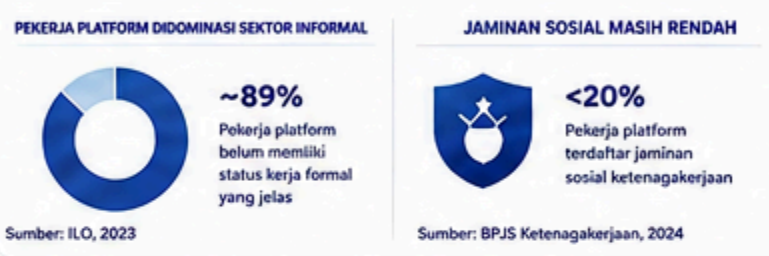
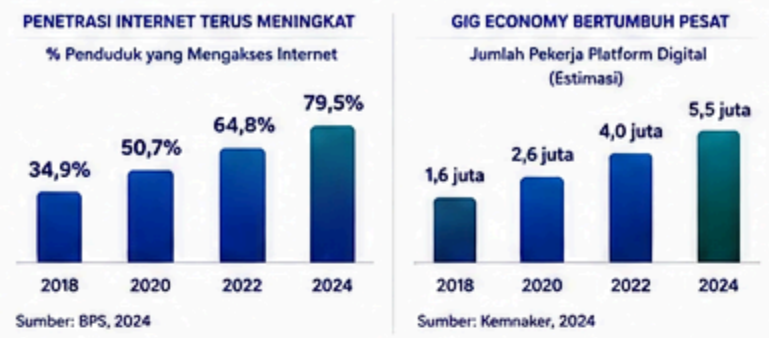
- Gig Worker Protection Framework
- Inclusive Digital Infrastructure
- Digital Governance & Regulation
- Digital Literacy & Adaptive Workforce

SIAPA YANG BERTINDAK?

Kominfo • Kemnaker • Bappenas
Pemerintah Daerah • Platform Digital
Sektor Swasta • DPR RI

2 FAKTA & ANALISIS MASALAH

A. FAKTA UTAMA



C. DAMPAK YANG TERJADI



3 SOLUSI KEBIJAKAN & ROADMAP IMPLEMENTASI

A. STRATEGI KEBIJAKAN NASIONAL

- NATIONAL GIG WORKER PROTECTION FRAMEWORK**
 - Menetapkan status pekerja platform dengan perlindungan minimum.
 - Jaminan sosial wajib (kesehatan, kecelakaan, pensiun).
 - Mekanisme penyelesaian sengketa yang adil & cepat.
- INCLUSIVE DIGITAL INFRASTRUCTURE**
 - Percepatan konektivitas di wilayah 3T (tertinggal, terdepan, terluar).
 - Akses internet terjangkau & berkualitas.
 - Fasilitasi perangkat dan ekosistem digital lokal.
- DIGITAL GOVERNANCE & REGULATION**
 - Regulasi komprehensif untuk platform, AI, data, dan algoritma.
 - Prinsip etika digital & transparansi algoritma.
 - Akuntabilitas platform & perlindungan data pribadi.
- DIGITAL LITERACY & ADAPTIVE WORKFORCE**
 - Program reskilling & upskilling nasional.
 - Literasi digital untuk semua kelompok.
 - Pengembangan talenta digital adaptif sesuai kebutuhan industri masa depan.

B. ROADMAP IMPLEMENTASI (2026-2030)



Prinsip Utama: Inklusif • Adil • Aman • Berkelanjutan • Inovatif

4 DAMPAK STRATEGIS, PEMANGKU KEPENTINGAN & AJAKAN BERTINDAK

A. DAMPAK YANG DIHARAPKAN

JANGKA PENDEK (1-2 TAHUN)	JANGKA MENENGAH (3-5 TAHUN)	JANGKA PANJANG (>5 TAHUN)
<ul style="list-style-type: none"> Perindungan dasar pekerja platform mulai berjalan Akses digital meningkat Literasi digital menguat 	<ul style="list-style-type: none"> Produktivitas pekerja digital meningkat Ekosistem digital inklusif Kesenjangan digital menurun 	<ul style="list-style-type: none"> Pekerjaan layak & terlindungi Ekonomi digital berkeadilan Indonesia menjadi negara digital yang kompetitif

B. PEMANGKU KEPENTINGAN (STAKEHOLDERS)



C. PESAN KUNCI

“ Digitalisasi adalah peluang besar, tetapi tanpa governansi yang kuat, ia dapat memperluas ketimpangan. Kita membutuhkan regulasi yang adil, infrastruktur yang inklusif, dan SDM yang adaptif agar transformasi digital membawa keadilan bagi semua. ”

– Prof. Septiana Dwiputrianti

D. DAFTAR PUSTAKA (SELECTED)

- BPS. (2024). Survei Penggunaan TIK, 2024.
- Kemnaker RI. (2024). Laporan Pekerja Platform Digital di Indonesia.
- BPJS Ketenagakerjaan. (2024). Statistik Kepesertaan, 2024.
- ILO. (2023). World Employment and Social Outlook 2023.
- World Bank. (2020). World Development Report 2020: Data for Better Lives.
- OECD. (2020). OECD Digital Economy Outlook 2020.
- Kominfo. (2024). Laporan Tahunan Sektor Digital Indonesia.

